

DINAMIKA REKRUTMEN POLITIK CALON KEPALA DAERAH DALAM PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2015

(STUDI KASUS DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN KABUPATEN WONOGIRI)

ICHWAN WIJAYANTO

ILMU PEMERINTAHAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2016

ABSTRAK

The function of political recruitment believed that it has an important role in political system in a country because through this process it will determine the people who will run the function of the country's political system through the existing of government institutions. This is the important role of political parties in doing political recruitment function, in doing political recruitment frequently there are some dynamics which appear whether from the internal or the external of the political parties. The purpose of this research is to describe about the dynamics of political recruitment which happened in internal of PDI Perjuangan Wonogiri Regency of the regent election in 2015. There was a strong candidate from PDI Perjuangan that was incumbent candidate, however the incumbent candidate did not get recommendation from DPP PDI Perjuangan.

In this research process the writer adopted Rahat and Hazan's theories about four important things which can show how is the organization of political parties in political recruitment (2001), by using descriptive qualitative analysis approach. In this research object the writer focused on the process of political recruitment which was run by DPC PDI Perjuangan Wonogiri Regency. That was using interview method with the candidate and party leader, observation, literature review, and documentation. Then, the data was processed into primary data.

In doing political recruitment process there were three people who registered to be candidate of Wonogiri regent from PDI Perjuangan. They were Danar Rahmanto (incumbent candidate), Joko Sutopo (The head of DPC PDI Perjuangan Wonogiri), Ir. Joko Purnomo, MH. In recruitment process DPC PDI Perjuangan Wonogiri Regency only obey the rule which has been determined by DPP. The selection of the candidate was done in the center, and with the people who have been assigned by DPP of the parties. In making the decision of who would get the recommendation is the authority of the center, the Central Board held the consultation with the internal party to determine who would get the recommendation.

Joko Sutopo was the name who got the recommendation from the center because he has followed all the recruitment process, furthermore he also has some excellence which did not have by the other candidates. DPC PDI Perjuangan Wonogiri Regency should notice all Wonogiri citizens so that they know that PDI Perjuangan opened registration for regent candidate. So, it would be more transparent and also to be a political education for Wonogiri citizens widely. When doing the institutionalization of political recruitment committee, it needs to involve people outside the party so that neutrality in political recruitment is always awake.

Keywords: political party, political recruitment, the organizing political parties.

PENDAHULUAN

Partai politik merupakan elemen yang sangat penting dibutuhkan oleh suatu negara, karena partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara (Budiardjo, 2008). Di negara Indonesia partai relatif dapat menjalankan fungsinya sesuai harkatnya pada saat kelahirannya, yakni menjadi wahana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingan di hadapan penguasa (Budiardjo, 2008).

Salah satu fungsi partai politik adalah fungsi rekrutmen. Fungsi rekrutmen berkaitan erat dengan masalah kepemimpinan, (Budiardjo, 2008) baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional.

Tahun 2015 merupakan sejarah baru bagi bangsa Indonesia, karena pada tahun 2015 dilaksanakan pilkada secara serentak di berbagai daerah di Indonesia. Berdasarkan keterangan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik, pasangan calon yang mendaftar ada 852 pasangan calon. Terdiri dari 21 pasangan calon untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 714 untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, serta 117 pasangan calon untuk pemilihan walikota dan wakil walikota (Ramadhany, 2016).

Salah satu peserta pilkada serentak pada tahun 2015 adalah kabupaten Wonogiri. Perpolitikan di Kabupaten Wonogiri pada saat pilkada tahun 2015 masih terpengaruh situasi Pilpres tahun 2014. Artinya masih adanya pengaruh Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Pada waktu itu Koalisi Indonesia Hebat Kabupaten Wonogiri yang beranggotakan PDIP dan Partai Nasdem mengusung Joko Sutopo dan Edy Santoso sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wonogiri. Joko Sutopo sendiri adalah kader PDIP, sedangkan Edy Santoso merupakan kader partai Golkar. Sedangkan Koalisi Merah Putih yang pada waktu itu tanpa Golkar, artinya KMP-Non Golkar. KMP-Non Golkar mengusung Hamid Noor Hasyim dan Wawan Setya Nugraha. Hamid adalah anggota DPR RI dari fraksi PKS, dan Wawan Setya Nugraha dulunya pernah menjadi kader PDIP.

Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu lumbung suara PDI-Perjuangan di Provinsi Jawa Tengah. Sehingga PDI-Perjuangan menjadi "kendaraan" politik yang menjanjikan untuk diperebutkan elit politik di Kabupaten Wonogiri. Dalam proses rekrutmen yang dilaksanakan PDI-Perjuangan terpilih satu nama yang akan dicalonkan PDI-Perjuangan. Dari dua nama yang menjadi kandidat calon Bupati Wonogiri dan dua nama yang menjadi kandidat calon Wakil Bupati Wonogiri, kemudian Joko Sutopo yang terpilih dari PDI-Perjuangan untuk menjadi Calon Bupati Wonogiri. Dalam proses rekrutmen politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yaitu pada proses rekrutmen calon Bupati Kabupaten Wonogiri tahun 2015 pastinya ada dinamika yang terjadi di dalamnya. Terpilihnya Joko Sutopo menjadi calon Bupati Wonogiri dari PDI-Perjuangan tentunya ada dinamika di dalam proses pencalonan beliau.

Salah satu kandidat terberat calon Bupati Wonogiri dari PDI-Perjuangan saat itu adalah calon dari petahana (*incumbent*). Yaitu Dinar Rahmanto, beliau adalah mantan Bupati pada periode sebelumnya dan baru menjabat satu kali periode. Namun kemudian Joko Sutopo bisa terpilih menjadi calon Bupati Wonogiri dari PDI-Perjuangan mengalahkan Dinar Rahmanto yang merupakan kandidat calon petahana.

Dalam kebiasaan yang terjadi di tubuh PDIP, partai yang berlambang kepala banteng ini mengusung calon kepala daerah dalam dua periode. Artinya partai ini biasanya mengusung kembali calon petahana (*incumbent*) yang baru menjabat selama satu periode. Hal ini terbukti dalam pilkada serentak tahun 2015, pengurus PDIP Jawa Tengah mengeluarkan rekomendasi kepada 21 pasangan calon di 21 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Dari 21 daerah yang menggelar Pilkada, PDIP mengusung calon berstatus petahana sebanyak delapan orang untuk delapan daerah di Jawa Tengah (kota Semarang, Sukoharjo, Boyolali, kota Magelang, Pematang, kota

Surakarta, kabupaten Semarang, Kendal). Selain itu, wakil bupati yang dijagokan menjadi calon bupati sebanyak lima orang untuk lima daerah di Jawa Tengah (Blora, kota Pekalongan, Klaten, Wonosobo, Purbalingga) (Dikutip dari Budi Purwanto dalam <https://m.tempo.co/>, pada 1 Oktober 2016 jam 07.38 WIB). Namun hal tersebut tidak berlaku di kabupaten Wonogiri, calon petahana yang baru menjabat satu periode gagal mendapatkan rekomendasi kembali dari PDIP.

Adapun mengapa penulis memilih objek PDI-Perjuangan di Kabupaten Wonogiri sebagai objek penelitian dalam skripsi ini adalah karena terpilihnya Joko Sutopo sebagai calon Bupati dari PDI-Perjuangan mengalahkan kandidat yang lain. Padahal di dalam pencalonan tersebut ada kandidat yang tidak kalah kuat, yaitu dari kandidat petahana (*incumbent*). Namun kemudian Joko Sutopo yang terpilih sebagai calon Bupati Wonogiri dari PDI-Perjuangan, mengalahkan kandidat petahana (*incumbent*) yang merupakan kandidat terkuat di dalam pencalonan sebagai calon Bupati Wonogiri dari PDI-Perjuangan.

Apa yang melatarbelakangi sehingga petahana (*incumbent*) tidak diusung kembali menjadi calon Bupati petahana Kabupaten Wonogiri oleh PDI-Perjuangan. PDI-Perjuangan bukan satu satunya partai yang ada di Kabupaten Wonogiri, lalu mengapa calon petahana (*incumbent*) tidak mencalonkan dengan "kendaraan" partai lain atau bahkan dengan pencalonan independent. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah ada hubungannya dengan besarnya "uang kapal" yang dikeluarkan suatu calon untuk menggunakan kendaran politik PDI-Perjuangan dalam pencalonan Bupati Wonogiri.

Hal tersebut menurut penulis sangat unik untuk sejarah perpolitikan di Indonesia khususnya di Kabupaten Wonogiri. Seorang calon Bupati Petahana (*incumbent*) gagal meraih rekomendasi untuk mencalonkan kembali sebagai calon Bupati Wonogiri. Seperti berita yang dilansir oleh www.infowonogiri.com, bahwa sejarah baru terjadi di ranah politik nasional khususnya di Kabupaten Wonogiri. Seorang Bupati petahana (*incumbent*) gagal meraih rekomendasi dari partainya untuk mencalonkan kembali sebagai Calon Bupati. Hal ini terjadi dalam rekrutmen/pendaftaran bakal Calon Bupati-Wakil Bupati Wonogiri dari PDI-Perjuangan. Bakal Calon Bupati petahana yaitu H. Dinar Rahmanti tidak mendapatkan rekomendasi dari PDI-Perjuangan. Beliau kalah dengan pesaingnya yaitu Joko Sutopo yang merupakan Ketua DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Wonogiri (Dikutip dari tulisan Baguss dalam www.infowonogiri.com, pada 1 Oktober 2016 jam 08.23 WIB)

Maka dari itu penulis ingin mengetahui proses serta latar belakang yang mendasari PDI-Perjuangan kemudian menentukan Joko Sutopo sebagai calon Bupati Wonogiri. Apakah memang proses rekrutmen yang dilaksanakan PDI-Perjuangan dilaksanakan secara transparan serta melibatkan semua kader PDI-Perjuangan di Kabupaten Wonogiri. Ataukah ada campur tangan dari elit politik PDI-Perjuangan di tingkat yang lebih tinggi. Walaupun keputusan akhir siapa yang akan ditunjuk untuk menjadi calon Bupati tetap di tangan Mega Wati Sukarno Putri sebagai ketua umum PDI-Perjuangan.

KERANGKA TEORI

1. Rekrutmen Politik

Menurut Czudnowski dalam (Pamungkas, 2012) rekrutmen politik adalah proses dimana individu dilibatkan dalam peran-peran politik aktif. Rekrutmen politik sering kali dipertukarkan dalam makna yang sama dengan seleksi kandidat (kandidasi), rekrutmen legislatif serta eksekutif. Bagi yang membedakan, rekrutmen politik didefinisikan sebagai bagaimana potensial kandidat ditarik untuk bersaing dalam jabatan publik, sedangkan seleksi kandidat adalah proses bagaimana kandidat dipilih dari kumpulan kandidat potensial; sementara itu rekrutmen legislatif bicara tentang bagaimana kandidat yang dinominasikan partai terpilih menjadi pejabat publik.

Perlakuan partai politik terhadap keseluruhan tahap-tahap rekrutmen politik sangat berhubungan dengan bagaimana partai politik mengorganisasikan diri. Menurut Rahat dan Hazan (Pamungkas, 2012) terdapat 4 (empat) hal penting yang dapat menunjukkan bagaimana pengorganisasian partai politik dalam rekrutmen politik, yaitu :

1. Siapa kandidat yang dapat dinominasikan (*Candidacy*)?
2. Siapa yang menyeleksi (*Selectorate*)?
3. Dimana kandidat diseleksi?
4. Bagaimana kandidat diputuskan?

Perlakuan terhadap keempat hal tersebut melahirkan model pengelolaan partai antara pola-model inklusif vs eksklusif, sentralistik vs desentralistik, demokratis vs otoriter, dan titik tengah diantara ekstrimitas-ekstrimitas tersebut. Terkait siapa yang dapat dinominasikan dalam rekrutmen politik dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat inklusifitas atau eksklusifitas. Dalam model inklusif, setiap pemilih dapat menjadi kandidat partai. Pembatasannya hanya regulasi yang ditetapkan negara. Sementara itu pada model, eksklusif terdapat sejumlah kondisi yang membatasi hak pemilih untuk dapat ikut serta dalam seleksi kandidat. Partai politik memberikan sejumlah persyaratan tambahan diluar yang ditentukan negara. Regulasi negara biasanya meletakkan persyaratan-persyaratan dasar bagi individu yang boleh menominasikan diri, diantaranya adalah persyaratan usia, kewarganegaraan, tempat tinggal, kualifikasi literasi, batas deposit uang, jumlah dukungan, dan sebagainya.

Tabel 1.1

Kandidat Yang Dapat Didominasi

Kandidat	Model
Semua Warga Negara	Inklusif
Anggota Partai + Syarat Tambahan	Eksklusif

Lalu siapakah yang menjadi penyeleksi (*The Selectorate*)? Penyeleksi adalah lembaga yang menyeleksi kandidat. Yang disebut lembaga ini berupa satu orang, beberapa atau banyak orang, sampai pada pemilih. Menurut Rahat dan Hazan (Pamungkas, 2012), penyeleksi dapat diklasifikasikan dalam sebuah kontinum, sama seperti kontinum kandidasi, berdasarkan tingkat inklusifitas dan eksklusifitas. Pada titik ekstrim, penyeleksi adalah sangat inklusif, yaitu pemilih yang memiliki hak memilih dalam pemilu. Dalam ekstrim yang lain, yaitu selektor sangat eksklusif dimana kandidasi ditentukan oleh pimpinan partai.

Tabel 1.2

Metode Penyeleksian Kandidat

Penyeleksi	Model
Pemilih	Inklusif
Pimpinan Partai	Eksklusif

Sementara itu pengorganisasian rekrutmen untuk menunjukkan dimana kandidat seleksi, secara ringkas terdapat dua metode yang dilakukan partai politik dalam menentukan dimana kandidat akan diseleksi. Pertama metode sentralistik adalah kandidat diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai pada tingkat nasional tanpa prosedur yang mengikutinya, seperti representasi teritorial atau fungsional. Metode kedua adalah kandidat diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai lokal atau kelompok sosial intra partai atau kelompok-kelompok sektorsial.

Tabel 1.3

Sektor Kandidat Diseleksi

Metode	Model
Terpusat	Sentralistik
Lokal	Desentralisasi

Desentralisasi teritorial adalah penyeleksi lokal menominasikan kandidat partai yang diantaranya dilakukan oleh pimpinan lokal, komite dari cabang sebuah partai, semua anggota atau pemilih di sebuah distrik pemilihan. Desentralisasi fungsional adalah seleksi kandidat dilakukan oleh korporasi yang kemudian memberikan jaminan representasi untuk representasi kelompok-kelompok dagang, perempuan, minoritas, dan sebagainya.

Dalam memahami seleksi kandidat yang berpengaruh terhadap bagaimana kandidat dinominasikan, Rahat dan Hazan dalam (Pamungkas, 2012) menyebutkan dua model konfrontatif, yaitu : pertama model pemilihan dan model penunjukan. Dalam sistem pemilihan, penominasian kandidat adalah melalui pemilihan diantaranya penyeleksi. Pada sistem murni, semua kandidat diseleksi melalui prosedur pemilihan tanpa seorang penyeleksi pun dapat mengubah daftar komposisi metode ini dapat disebut sebagai metode demokrasi. Sementara dalam sistem penunjukan, penentuan kandidat tanpa menggunakan pemilihan. Dalam sistem penunjukan murni, kandidat ditunjuk tanpa membutuhkan persetujuan oleh agensi partai yang lain kecuali penominasian oleh partai atau pemimpin partai yang bisa disebut dengan metode otoriter.

Tabel 1.4
Kandidat Diputuskan

Metode	Model
Demokratis	Pemilihan
Otoriter	Penunjukan

Didasarkan pada peran yang akan mereka mainkan dalam organisasi serta harapan yang mereka inginkan, terdapat dua tipe aktifis partai yang dihasilkan dalam proses seleksi kandidat, yaitu tipe aktivis partai profesional (*pragmatis*) dan tipe aktivis partai amatir (*amateur*). Tipe yang pertama, pekerja partai yang loyal utamanya ditunjukkan pada partai itu sendiri dan gaya bekerjanya adalah pragmatis. Mereka adalah pendukung partai reguler yang mendukung partainya baik dalam situasi baik maupun dalam situasi buruk. Tipe kedua adalah amatir, mereka sangat berorientasi pada isu dan dimotivasi oleh esentif bertujuan yang melihat aktivis partai hanya salah satu alat mencapai tujuan politik yang penting. (Pamungkas, 2012)

METODE PENELITIAN

Dalam menganalisis data penulis menggunakan cara deskriptif kualitatif. Menurut Sanapiah Faisal dalam (Neuman, 2000) deskriptif adalah suatu penelitian yang digunakan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai fenomena dan keadaan sosial dengan cara mendeskripsikan variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Adapun tipe dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sedangkan menurut Denzin dan Lincoln (1987) dalam (Moleong, 2005) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Sedangkan yang dimaksud deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisa data yang telah masuk untuk kemudian diadakan pengelolaan dari data tersebut sehingga akan tersusun dalam bentuk pengurutan, gambaran, dan pengklasifikasian terhadap masalah-masalah yang sedang diteliti sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan (Surachmad, 1982).

Sehingga dalam penelitian ini peneliti akan melihat secara kritis proses rekrutmen calon Bupati Wonogiri dari PDI-Perjuangan dalam pemilukada serentak tahun 2015. Dari proses rekrutmen tersebut kemudian penulis mencoba untuk mengurutkan, menggambarkan, dan mengklasifikasikan masalah yang sedang penulis teliti. Sehingga dapat diambil kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian ini dilaksanakan di Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan kabupaten Wonogiri. Jenis data dan sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data menggunakan tiga metode yaitu wawancara, observasi dan angket/kuesioner. Kegiatan analisis data dalam penelitian ini, akan dimulai dengan menelaah seluruh data yang terkumpul baik data primer maupun sekunder yang berupa hasil wawancara, observasi dan dokumentasi/catatan lapangan. Hasil data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data tersebut, kemudian penulis susun menjadi laporan yang sistematis. Pembahasan hasil penelitian dijabarkan dalam bentuk deskriptif yang didukung dengan teori yang bersumber dari buku. Selanjutnya dianalisa untuk mengetahui proses rekrutmen politik calon kepala daerah DPC PDI Perjuangan

kabupaten Wonogiri. Tahapan terakhir yakni menarik beberapa kesimpulan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

HASIL DAN ANALISIS

A. Penominasian Kandidat

Menurut Rahat dan Hazan dalam (Pamungkas, 2012) ada dua model dalam penominasian kandidat yaitu model inklusif atau model eksklusif. Pada bagian ini penulis akan menjelaskan tentang bagaimana kandidat yang ada di PDI Perjuangan dinominasikan. Apakah PDI Perjuangan menggunakan model inklusif atau eksklusif. Dalam model inklusif setiap pemilih dapat menjadi kandidat partai. Pembatasannya hanya regulasi yang ditetapkan negara. Sedangkan pada model eksklusif terdapat sejumlah kondisi yang membatasi hak pemilih untuk dapat ikut serta dalam seleksi kandidat. Partai memberikan sejumlah persyaratan tambahan diluar yang ditentukan negara.

Penominasian kandidat calon berkaitan erat dengan pendaftaran seleksi yang dilakukan oleh suatu partai politik. Saat membuka pendaftaran, sebuah partai politik pasti meminta syarat pendaftaran kepada kandidat calon kepala daerah yang ingin mendaftar. Begitu pula panitia penjurian dan penyaringan calon bupati/wakil bupati PDI Perjuangan kabupaten Wonogiri tentunya memberikan syarat kepada calon bupati yang akan mendaftar melalui PDI Perjuangan. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon adalah persyaratan yang bersifat administratif sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh KPU.

Adapun persyaratan untuk menjadi kandidat kepala daerah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakilnya bab 2 bagian kesatu pasal 4 tentang persyaratan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota. Tidak ada persyaratan khusus yang disyaratkan PDI Perjuangan untuk dapat mendaftarkan kandidat calon bupati Wonogiri dari PDI Perjuangan.

Dalam pembukaan pendaftaran yang dilakukan PDI Perjuangan ada lima nama yang masuk untuk mendaftar menjadi kandidat calon bupati dan calon wakil bupati. Tiga nama mendaftar sebagai kandidat calon bupati. Mereka adalah (1) Danar Rahmanto selaku kandidat petahana/*incumbent* dari PDI Perjuangan, (2) Joko Sutopo adalah ketua DPC PDI Perjuangan kabupaten Wonogiri, (3) Ir. Joko Purnomo, MH yang merupakan wakil ketua komisi D DPRD provinsi Jawa Tengah. Dan ada dua nama yang mendaftar menjadi kandidat calon wakil bupati. Dua nama tersebut adalah Ir. Suprpto yang merupakan mantan birokrat, serta Bapak Mubarok yang berlatar belakang dari PNS juga sebagai ketua PCNU kabupaten Wonogiri.

Dari kelima nama yang masuk mendaftar menjadi kandidat calon bupati dan calon wakil bupati tersebut berasal dari latar belakang yang berbeda. Tiga nama yang mendaftar calon bupati adalah merupakan kader PDI Perjuangan kabupaten Wonogiri. Dan dua nama yang mendaftar sebagai calon wakil bupati berlatar belakang dari non PDI Perjuangan. Artinya PDI Perjuangan membuka pendaftaran calon dan calon wakil bupati ini adalah untuk umum. Tidak ada batasan atau syarat yang mengharuskan bahwa yang mendaftar harus kader PDI Perjuangan.

Dari kelima nama yang telah lolos di proses verifikasi data tersebut semuanya diwajibkan untuk mengikuti tahapan seleksi yang selanjutnya. Setiap kandidat calon diwajibkan mengikuti setiap tahapan yang sudah ditentukan oleh PDI Perjuangan. Dalam tahapan yang selanjutnya proses juga dilaksanakan secara terbuka. Tidak ada perbedaan antara kandidat non-partai dengan kandidat dari kader PDI Perjuangan, semua diperlakukan sama dan prosesnya juga dilakukan secara transparan.

Penominasian kandidat dalam proses rekrutmen politik dapat dikatakan ideal adalah masyarakat dilibatkan dalam proses rekrutmen politik tersebut. Karena selain memiliki fungsi rekrutmen politik, partai politik juga memiliki fungsi pendidikan politik baik itu kepada anggota partai maupun kepada masyarakat secara luas. Ketika sebuah partai melakukan proses rekrutmen politik dengan melibatkan masyarakat

sebagai pesertanya maka partai tersebut sudah sekaligus melaksanakan dua fungsi partai politik yaitu fungsi rekrutmen politik dan fungsi pendidikan politik.

Hal ini sudah dilakukan PDI Perjuangan khususnya pada pemilukada serentak tahun 2015 di kabupaten Wonogiri. PDI Perjuangan membuka kepada siapa saja yang ingin mendaftar kandidat calon bupati melalui PDI Perjuangan selama dia memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh KPU pusat. Baik itu kader PDI Perjuangan ataupun selain kader PDI Perjuangan. Maka dalam hal ini PDI Perjuangan dapat dikatakan partai yang ideal karena sudah melibatkan masyarakat sebagai peserta atau kandidat calon bupati dalam proses seleksi calon bupati di kabupaten Wonogiri.

PDI Perjuangan merupakan partai terbuka, sehingga pendaftaran calon bupati dan calon wakil bupati yang dilakukan oleh PDI Perjuangan ini juga dilakukan secara terbuka artinya dibuka untuk umum. Tidak hanya kader PDI Perjuangan yang bisa mendaftar sebagai kandidat calon namun orang non-partai juga bisa mendaftar sebagai kandidat calon. Tidak ada perbedaan dalam proses seleksi antara kandidat calon non-partai dan dari kader PDI Perjuangan. Dalam proses seleksi dilakukan secara terbuka dan transparan, sehingga masyarakat dapat memantau jalannya seleksi.

B. Penyeleksi Kandidat

Penyeleksi adalah lembaga yang menyeleksi kandidat. Yang disebut lembaga ini berupa satu orang, beberapa atau banyak orang, sampai pada pemilih. Menurut Rahat dan Hazan dalam (Pamungkas, 2012), penyeleksi dapat diklasifikasikan dalam sebuah kontinum, sama seperti kontinum kandidasi, berdasarkan tingkat inklusifitas dan eksklusifitas. Pada titik ekstrim, penyeleksi adalah sangat inklusif, yaitu pemilih yang memiliki hak memilih dalam pemilu. Dalam ekstrim yang lain, yaitu selektor sangat eksklusif dimana kandidasi ditentukan oleh pimpinan partai. (Pamungkas, 2012)

Pada PDI Perjuangan lembaga yang menyeleksi kandidat calon kepala daerah disebut tim atau panitia seleksi untuk seleksi di tingkat pusat atau DPP PDI Perjuangan. Dan disebut panitia penyaringan dan penjaringan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah untuk di tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Seperti pada DPC PDI Perjuangan kabupaten Wonogiri membentuk panitia penjaringan dan penyaringan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pembentukan panitia ini berdasarkan surat keputusan (SK) Nomor : 01/KPTS/PDI P/WI/II/2015 tentang susunan panitia penjaringan dan penyaringan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Wonogiri.

Kewenangan dari panitia penjaringan dan penyaringan ini adalah untuk melakukan sosialisasi untuk menarik minat kandidat calon bupati yang berkualitas di daerah untuk mendaftar melalui PDI Perjuangan, baik itu kader PDI Perjuangan atau diluar kader PDI Perjuangan. Selain itu panitia ini juga bertugas untuk menjaring dan menyaring kandidat calon bupati yang mendaftar melalui PDI Perjuangan. Penjaringan dan penyaringan hanya seleksi yang bersifat administratif saja. Artinya panitia ini hanya bertugas memverifikasi data yang masuk dari kandidat calon yang mendaftar ke PDI Perjuangan.

Panitia penjaringan dan penyaringan tersebut dibentuk dari PDI Perjuangan. Panitia ini dibentuk dan ditunjuk melalui Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan, sesuai surat keputusan (SK) Nomor : 01/KPTS/PDI P/WI/II/2015 tentang susunan panitia penjaringan dan penyaringan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Wonogiri. Jadi yang ditugaskan menjadi panitia penjaringan dan penyaringan tersebut dari internal PDI Perjuangan kabupaten Wonogiri. Yaitu kader PDI Perjuangan yang memang sudah kompeten di bidangnya.

Dari nama-nama yang ditugaskan sebagai panitia penjaringan dan penyaringan calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah kabupaten Wonogiri tahun 2015 tersebut, semuanya adalah kader dari PDI Perjuangan kabupaten Wonogiri. Dan mayoritas latar belakang mereka adalah struktur pengurus DPC PDI Perjuangan kabupaten Wonogiri.

Ketua panitia, Setyo Sukarno adalah sekretaris DPC PDI Perjuangan. Wakil ketua 1, Ir. Joko Purnomo, MH saat ini merupakan wakil ketua komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wakil ketua 2, Gimanto,SH adalah wakil ketua DPC PDI Perjuangan kabupaten Wonogiri bidang kehormatan. Wakil ketua 3, Endang Pujiastuti,

S.Pak adalah wakil bendahara DPC PDI Perjuangan kabupaten Wonogiri dan saat ini merupakan anggota DPRD kabupaten Wonogiri dari daerah pemilihan (Dapil) IV. Sekretaris 1, Soetarno SR, Sos adalah ketua PAC kecamatan Giritontro. Sekretaris 2, Martanto,SH adalah wakil sekretaris DPC PDI Perjuangan kabupaten Wonogiri. Wakil sekretaris 3, Sutoyo adalah wakil ketua bidang infokom, sumber daya dan dana DPC PDI Perjuangan kabupaten Wonogiri. Sekretaris 4, Endang Sulastri adalah kader PDI Perjuangan dari kecamatan Wonogiri. Bendahara 1, Sriyono, S.Pd adalah bendahara DPC PDI Perjuangan kabupaten Wonogiri. Dan wakil bendahara 2, Titik Sugiarti adalah wakil bendahara DPC PDI Perjuangan kabupaten Wonogiri.

Semua struktur panitia penjangkaran dan penyaringan merupakan internal dari PDI Perjuangan. Namun kewenangan mereka terbatas, hanya sebatas melakukan sosialisasi terkait pembukaan pendaftaran calon kepala daerah dari PDI Perjuangan, melakukan penjangkaran dan penyaringan, serta melakukan seleksi administratif.

Dalam proses rekrutmen yang ada pada PDI Perjuangan adalah kewenangan penuh ada pada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan. Mulai dari mekanisme ditentukan oleh DPP PDI Perjuangan. DPC PDI Perjuangan kabupaten Wonogiri hanya memiliki otoritas untuk membentuk tim dalam rangka merespon pihak-pihak yang ingin mendaftar melalui PDI Perjuangan kabupaten Wonogiri dan panitia ini hanya bersifat administratif. Panitia ini hanya bertugas untuk melakukan penjangkaran dan penyaringan bagi siapa yang ingin mendaftar sebagai kandidat calon bupati Wonogiri dari PDI Perjuangan. Namun kewenangan tetap di tangan pusat yaitu pada tim seleksi yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan.

Penyeleksi kandidat idealnya terdiri atas beberapa elemen, tidak hanya terdiri dari internal partai apalagi terfokus pada dewan pimpinan pusat partai saja. Namun juga melibatkan pihak penyeleksi diluar anggota partai tersebut. Sehingga dapat dilaksanakan proses seleksi secara transparan serta netralitas penyeleksi calon kepala daerah tersebut lebih terjaga.

Namun hal tersebut tidak terjadi di tubuh PDI Perjuangan dalam proses seleksi kandidat calon kepala daerah dalam pemilukada serentak tahun 2015. Dalam proses seleksi calon kepala daerah di tubuh PDI Perjuangan penyeleksi kandidat ditunjuk atau ditentukan oleh dewan pimpinan pusat partai PDI Perjuangan. Sehingga dalam proses seleksi calon kepala daerah tidak bisa dinilai netralitas penyeleksi kandidat tersebut. Penyeleksi kandidat dalam proses rekrutmen politik dalam tubuh PDI Perjuangan belum dapat dikatakan ideal karena penyeleksi kandidat calon kepala daerah hanya terfokus pada pusat dan tidak melibatkan orang diluar partai, sehingga netralitas penyeleksi kandidat tersebut belum sepenuhnya netral.

C. Kandidat diseleksi

Berkaitan dengan seleksi kandidat, ini adalah terkait dengan dimana kandidat diseleksi. Menurut Rahat dan Hazan dalam (Pamungkas, 2012) secara ringkas terdapat dua metode yang dilakukan partai politik dalam menentukan dimana kandidat akan diseleksi. Pertama metode sentralistik adalah kandidat diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai pada tingkat nasional tanpa prosedur yang mengikutinya, seperti representasi teritorial atau fungsional. Metode kedua adalah kandidat diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai lokal atau kelompok sosial intra partai atau kelompok-kelompok sektional (Pamungkas, 2012).

Dalam bagian ini penulis akan membahas terkait dimana kandidat calon bupati dari PDI Perjuangan ini diseleksi. Secara garis besar dalam melakukan seleksi kandidat calon kepala daerah baik gubernur maupun bupati/walikota PDI Perjuangan dilaksanakan di tingkat nasional atau pusat. Jadi kewenangan ada di tangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan.

Dalam melakukan seleksi calon kepala daerah baik gubernur dan bupati/walikota Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan mempunyai kewenangan penuh atas itu. Pada tingkat daerah juga dilibatkan dalam proses seleksi, namun hanya mempunyai kewenangan untuk melakukan penjangkaran dan penyaringan. Serta memverifikasi data sebelum nanti akhirnya disetorkan ke pusat. Finalisasi dari proses seleksi adalah kewenangan penuh ada di tangan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan.

Data/berkas pendaftaran yang sudah masuk dan sudah diverifikasi pada panitia penjurangan dan penyaringan di tingkat DPC, kemudian data tersebut diserahkan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) melalui Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di Jawa Tengah.

Setelah data tersebut diserahkan kepada Dewan Pimpinan Pusat, maka Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan mengadakan tahapan seleksi yang selanjutnya. Seleksi ini diselenggarakan oleh DPP PDI Perjuangan, namun dalam pelaksanaannya dilaksanakan di tingkat DPD yaitu di Semarang. Seleksi ini meliputi uji kelayakan / *fit and propertest*, uji psikotest, serta ujian wawasan kebangsaan. Dari kelima nama (3 calon bupati dan 2 calon bupati) yang sudah masuk dan memenuhi syarat administratif wajib mengikuti tahapan selanjutnya yang diselenggarakan oleh DPP PDI Perjuangan. Dari hasil seleksi tersebut nantinya bakal diketahui siapa yang layak menurut PDI Perjuangan dan akan mendapatkan rekomendasi menjadi kandidat calon bupati yang diusung PDI Perjuangan dalam pemilukada kabupaten Wonogiri tahun 2015.

Terkait dimana proses rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik adalah sesuatu yang sangat penting, karena hal ini terkait proses rekrutmen politik dilakukan secara sentralistik atau desentralistik. Sentralistik lebih terfokus di pusat atau dewan pimpinan pusat, dan desentralistik memberikan kewenangan kepada daerah untuk melakukan rekrutmen secara penuh.

Idealismenya adalah rekrutmen politik dilakukan ditingkat daerah namun juga atas persetujuan pusat. Artinya daerah diberikan kewenangan penuh untuk melakukan rekrutmen politik karena daerahlah yang mengetahui potensi sumber daya manusia yang layak untuk dijadikan calon kepala daerah dari partainya. Namun juga tidak melupakan dewan pimpinan pusat sebagai pimpinan dalam sebuah partai politik. Kewenangan dewan pimpinan pusat adalah menyetujui atau tidak menyetujui kandidat calon yang diusulkan atau diseleksi oleh tim panitia seleksi di tingkat daerah.

Namun yang terjadi pada tubuh PDI Perjuangan khususnya dalam proses rekrutmen politik calon kepala daerah dalam pemilukada serentak tahun 2015 di kabupaten Wonogiri cenderung kurang ideal. Karena proses rekrutmen politik yang dilakukan PDI Perjuangan dalam pemilukada serentak tahun 2015 hanya terfokus pada aturan atau mekanisme yang dibuat oleh pusat. Pusat memiliki kewenangan penuh atas proses rekrutmen calon kepala daerah. Daerah hanya memiliki sedikit kewenangan yaitu untuk melakukan penyaringan/penjurangan dan seleksi secara administratif saja.

D. Kandidat diputuskan

Pada bagian ini akan menjelaskan bagaimana kandidat calon kepala daerah yang sudah mendaftar ke PDI Perjuangan diputuskan. Menurut Rahat dan Hazan dalam (Pamungkas, 2012) dalam memutuskan calon kepala daerah terdapat dua model yaitu model seleksi pemilihan kandidat (Demokratis) dan model penunjukan (Otoriter), model seleksi pemilihan adalah model dimana semua calon kepala daerah diseleksi melalui prosedur pemilihan yang ada, tanpa seorang penyeleksi pun dapat mengubah daftar komposisi. Sedangkan model yang kedua yaitu menggunakan model penunjukan murni dimana kandidat hanya yang akan diusung ditunjuk oleh pimpinan partai tanpa melalui proses seleksi yang mengikutinya, kandidat ditunjuk tanpa membutuhkan persetujuan oleh agensi partai yang lain kecuali penominsian oleh partai atau pemimpin partai. (Pamungkas, 2012)

Terkait hal pengambilan keputusan terhadap kandidat, yang terjadi di dalam PDI Perjuangan adalah setiap kandidat yang akan mengikuti bursa pencalonan tetap harus mengikuti tahapan atau proses seleksi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat melalui panitia seleksi di tingkat pusat. Dalam hal memutuskan kandidat yang lolos seleksi dilakukan pertahap sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan. Dari setiap tahapan seleksi tersebut kandidat akan mendapatkan nilai atau hasil seleksi, dari hasil seleksi itu yang nantinya akan digunakan sebagai landasan untuk tahapan yang selanjutnya. Setelah diketahui nilai dari setiap calon, maka Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan melalui tim seleksi melakukan rapat koordinasi untuk menentukan

siapa yang lolos menjadi kandidat calon kepala daerah dan mendapatkan rekomendasi dari PDI Perjuangan.

Dalam seleksi calon bupati dan wakil kabupaten Wonogiri melalui PDI Perjuangan, kelima kandidat calon yang mendaftar tersebut dinyatakan lolos secara administratif karena telah memenuhi berkas yang telah disyaratkan. Karena seleksi tersebut dilakukan secara terbuka maka kelima kandidat calon dinyatakan lolos dan diwajibkan mengikuti seluruh rangkaian proses seleksi kandidat calon bupati.

Rekomendasi ini menjadi dasar/acuan bagi dewan pimpinan cabang kabupaten Wonogiri untuk mendaftarkan pasangan calon bupati dan wakil bupati. Artinya tidak mungkin DPC akan mendaftarkan calon bupati dan wakil bupati ke KPU tanpa rekomendasi dari DPP. Setelah didaftarkan menjadi pasangan calon bupati dan wakil bupati, maka partai mempunyai kewajiban harus mengamankan dan memenangkan calon yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat.

Dalam menentukan siapa yang mendapatkan rekomendasi partai bersifat kolektif kolegial, artinya untuk memutuskan siapa yang akan mendapatkan rekomendasi dari PDI Perjuangan dilakukan melalui rapat internal DPP PDI Perjuangan dan tidak diputuskan secara sepihak. Namun secara legalitas yang bertanda tangan adalah Megawati Sukarnoputri selaku ketua umum DPP PDI Perjuangan dan Ir. Hasto Kristiyanto, M.M selaku sekretaris jenderal DPP PDI Perjuangan.

Dalam pencalonan bupati Wonogiri di PDI Perjuangan tidak dipungkiri bahwa memang ada satu nama yang merupakan kandidat terkuat yaitu Dinar Rahmanto sebagai kandidat petahana/*incumbent*. Namun kemudian Joko Sutopo yang mendapatkan rekomendasi dari PDI Perjuangan untuk maju dalam pemilukada kabupaten Wonogiri tahun 2015. Tentunya ada keunggulan Joko Sutopo dibandingkan kandingan calon yang lain termasuk kandidat calon petahana/*incumbent* sehingga Joko Sutopo dapat mendapat rekomendasi dari PDI Perjuangan.

Keunggulan Joko Sutopo sendiri diantaranya adalah, Joko Sutopo merupakan ketua partai politik (Ketua DPC PDI Perjuangan kabupaten Wonogiri). Sehingga jika Joko Sutopo merupakan ketua partai politik maka semangat membangun kepartaiannya akan lebih tinggi. Komitmen, konsekuensi, serta loyalitas tentunya akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan yang bukan ketua partai.

Dari segi loyalitas dan konsistensi Joko Sutopo memang lebih unggul dibandingkan dengan Dinar Rahmanto. Karena Dinar Rahmanto pernah mencalonkan bupati melalui partai lain, yaitu pada pemilihan bupati yang sebelumnya tahun 2009. Memang Dinar Rahmanto merupakan kader PDI Perjuangan, namun pada pencalonan bupati tahun 2009 itu Dinar Rahmanto mencalonkan bupati dengan kendaraan politik lain. Hal ini merupakan ketidak konsistenan Dinar Rahmanto dibandingkan Joko Sutopo.

Dalam hal kepemimpinan Joko Sutopo memiliki konsistensi, serta visualisasi karena nuansa orang kepartaian itu lebih kental dibandingkan orang baru atau kader yang belum lama di dalam PDI Perjuangan. Nuansa kepartaian sangat terasa lebih kuat ketika kepala daerah merupakan kader murni partai politik. Sehingga dalam hal kepemimpinan Joko Sutopo dinilai lebih unggul dibandingkan yang lain. Joko Sutopo dinilai dapat merangkul kader partai dari tingkat yang struktur yang paling dan mempunyai link komunikasi kepada struktur partai yang lebih tinggi. Hal ini penting karena seorang harus dekat kepada bawahan, serta harus mempunyai link/hubungan komunikasi kepada atasan untuk loby-loby politik terkait kebijakan yang akan dibuat.

Hal tersebut diatas merupakan salah satu faktor keunggulan Joko Sutopo dibandingkan Dinar Rahmanto. Peran Joko Sutopo dalam partai sangat penting yaitu sebagai ketua partai (ketua DPC), sehingga jika Joko Sutopo terpilih menjadi bupati Wonogiri diyakini akan membawa semangat kepartaian dalam kepemimpinannya. Dan diyakini tidak akan mengkhianati partainya, karena Joko Sutopo merupakan ketua partai sehingga loyalitas dan konsistensinya lebih unggul dibandingkan kader yang lain.

Dari uraian diatas dapat diketahui apa yang melatar belakangi PDI Perjuangan memilih Joko Sutopo sebagai kandidat calon bupati Wonogiri tahun 2015. Dari segi

proses atau pola rekrutmen yang diterapkan PDI Perjuangan memang sudah disiapkan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai sehingga level/tingkat dibawahnya (DPD dan DPC) tinggal mengikuti mekanisme yang ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat. Dari segi penilaian dan tempat dilaksanakannya seleksi adalah kewenangan pusat. Kemudian dalam pengambilan keputusan adalah dari hasil penilaian proses seleksi yang diikuti masing-masing calon. Pihak yang melakukan penilaian adalah dari tim penilai yang ditugaskan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai.

Dari penilaian tersebut kemudian diadakan rapat di internal DPP PDI Perjuangan untuk menentukan satu nama yang akan mendapatkan rekomendasi dari PDI Perjuangan untuk maju sebagai calon kepala daerah. Yang terjadi dalam proses rekrutmen calon bupati di kabupaten Wonogiri Joko Sutopo adalah nama yang mendapatkan rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan untuk maju dalam pemilihan bupati Wonogiri tahun 2015.

Idealismenya kandidat diputuskan dalam sebuah proses rekrutmen politik adalah dilakukan secara demokratis. Karena dengan cara yang demokratis, proses rekrutmen politik akan terlihat lebih transparan. Hal itulah yang dilakukan PDI Perjuangan dalam pemilihan bupati serentak tahun 2015. Kandidat diputuskan dengan cara yang demokratis, sehingga semua kandidat yang mendaftar wajib mengikuti seluruh proses dan dari proses tersebut akan dilakukan penilaian dengan cara musyawarah. Setelah itu muncul satu nama yang akan mendapatkan rekomendasi dari partai untuk maju sebagai calon kepala daerah.

Kesimpulan

1. Proses penominasian kandidat (*candidacy*) pada rekrutmen politik yang dilakukan PDI Perjuangan menggunakan pola/model inklusif karena semua pemilih dapat menjadi kandidat calon bupati dari PDI Perjuangan. Yang hanya dibatasi oleh regulasi yang ditetapkan negara, yaitu berkas dan persyaratan yang disyaratkan oleh KPU untuk menjadi kepala daerah. Lebih lanjut dalam pengaplikasian pola rekrutmen politik PDI Perjuangan memberikan porsi yang sama kepada kandidat calon yang mendaftar ke PDI Perjuangan. Artinya kandidat calon yang telah memenuhi persyaratan semuanya dapat mengikuti tes selanjutnya yang dilaksanakan DPP PDI Perjuangan. Dan tes tersebut dilaksanakan secara bersamaan baik orang PDI Perjuangan maupun orang dari luar PDI Perjuangan. Sehingga proses rekrutmen kandidat calon bupati dalam PDI Perjuangan tidak ada perbedaan antara kandidat calon dari PDI Perjuangan maupun kandidat dari luar PDI Perjuangan artinya seleksi calon bupati dalam PDI Perjuangan ini dilakukan secara terbuka dan transparan.
2. Penentuan penyeleksi kandidat (*selectorate*) yang dilakukan oleh PDI Perjuangan dalam pemilihan bupati Wonogiri tahun 2015 menggunakan model eksklusif. Selektoral bersifat eksklusif dimana kandidasi ditentukan oleh pimpinan partai. Atau lebih spesifiknya disebut dengan sistem pola informal-interlokal, karena mulai dari prosedur atau mekanisme untuk melakukan rekrutmen ditentukan pimpinan partai (DPP). Namun mereka juga membentuk panitia penjangkaran dan penyaringan yang secara khusus diberikan “sedikit” kewenangan untuk melakukan penyaringan dan penjangkaran serta seleksi administratif terkait berkas yang masuk dari kandidat yang mendaftar kandidat calon bupati di PDI Perjuangan. Dibentuknya panitia penjangkaran ini adalah berfungsi untuk menekan dan meminimalisir indikasi adanya dominasi yang dilakukan pemimpin partai. Melakukan pembatasan kewenangan atau tidak menyertakan pemilih sebagai bagian dari pihak yang menyeleksi calon kandidat.
3. Penentuan dimana kandidat calon kepala daerah baik gubernur maupun bupati/walikota yang dilakukan oleh PDI Perjuangan diseleksi adalah menggunakan pola atau model sentralistik. Artinya seleksi calon kepala daerah terfokus/terpusat pada Dewan Pimpinan Pusat Partai. Memang ada keterlibatan daerah dalam pelaksanaan seleksi, namun keterlibatan daerah hanya sebatas melakukan penjangkaran dan penyaringan serta melakukan seleksi administratif berkas-berkas calon bupati yang ingin mendaftar melalui PDI Perjuangan. Jadi daerah hanya mengikuti mekanisme yang sudah ditentukan oleh pusat partai. Sehingga kewenangan ada di tangan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan.

4. Prosedur pemutusan kandidat yang dilakukan oleh PDI Perjuangan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan kandidat yang terpilih adalah menggunakan pola kandidat dengan prinsip seleksi yang lebih demokratis. Hal ini dibuktikan dengan semua kandidat calon mengikuti seluruh proses yang ditentukan oleh PDI Perjuangan. Semua mekanisme seleksi memang ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat namun dalam proses seleksi kandidat dilaksanakan secara transparan dan terbuka. Dalam penentuan siapa yang mendapatkan rekomendasi juga berdasarkan hasil dari proses seleksi mulai dari tahap pendaftaran hingga tahap akhir. Untuk menentukan siapa yang mendapatkan rekomendasi juga melalui rapat pada internal DPP PDI Perjuangan karena PDI Perjuangan mengedepankan musyawarah untuk menentukan segala macam keputusan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa apa yang melatarbelakangi PDI Perjuangan memilih Joko Sutopo sebagai calon bupati Wonogiri adalah memang karena dalam proses seleksi calon bupati dari awal hingga akhir penilaian Joko Sutopo telah mengikuti semua mekanisme yang telah ditentukan oleh PDI Perjuangan. Dan dari proses atau mekanisme tersebut dinilai Joko Sutopo adalah yang layak menjadi kandidat calon bupati Wonogiri dari PDI Perjuangan. Karena beliau memiliki beberapa keunggulan yang memang tidak dimiliki kandidat calon yang lain. Beberapa keunggulan yang dimiliki Joko Sutopo diantaranya beliau adalah ketua partai (Ketua DPC PDI Perjuangan kabupaten Wonogiri). Yang dinilai loyalitas dan konsistensinya terhadap partai akan lebih tinggi dibandingkan kandidat yang lain. Sehingga memang wajar jika rekomendasi itu turun kepada Joko Sutopo bukan kepada Danar Rahmanto yang merupakan kandidat petahana/*incumbent*. Selain itu ada keuntungan yang diperoleh partai jika Joko Sutopo terpilih menjadi bupati Wonogiri. Keuntungan tersebut adalah akan tercapainya tujuan umum dan tujuan khusus yang dimiliki oleh PDI Perjuangan. Dengan tujuan tersebut diharapkan masyarakat akan mendapatkan kepuasan terhadap kinerja seorang kader partai dan PDI Perjuangan akan mendapatkan legitimasi dari masyarakat Wonogiri.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amal, Ichlasul, 1996. *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta : PT Tiara Wacana Yogya.
- Budiardjo, Miriam, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* . Jakarta: PT. Gramedia.
- Cipto, Bambang, 1996. *Prospek dan Tantangan Partai Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dadang, Kuswana, 2011. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : Pustaka Setia.
- Edwin, Donni, dkk, 2005. *Pemilukada Langsung “Demokratisasi Daerah dan Mitos Good Governance”* . Jakarta : Partnership for Governance Reform in Indonesia dengan Pusat Kajian Politik Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Huberman, Matthew B. Miles & A. Michael, 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : UI Press.
- Koentjaraningrat, 1981. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Gramedia.
- Koirudin, 2004. *Partai Politik dan Agenda Transisi demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kumolo, Tjahjo, 2015. *Politik Hukum Pilkada Serentak*. Jakarta : Expose Publika.
- Moleong, Lexy J, 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari, 1983. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University press.
- Neuman, Lawrence, 2000. *Social Research Methods : Qualitativ and Quantitatives Approaches Fourth Edition*. USA : Allyn and Bacon.
- Pamungkas, Sigit, 2011. *Partai Politik :Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta : Institute for Democracy and Welfarism.
- Sarman, Mukhtamar, 2015. *Pilkada Serentak : Quo Vadis Kedaulatan Rakyat*. Yogyakarta : PT. LKiS Printing Cemerlang.
- Surachmad, Winarno, 1975. *Suatu Pengantar Dasar dan Teknik Research*. Bandung: CV. Tarsito.
- Suyoto, 2016. *Perbandingan Pola Rekrutmen Politik Antara Partai Politik Islam Dan Nasionalis Pada Pemilu 2014*. Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. (Skripsi)
- Syafiie, Inu Kencana, 2012. *Teori dan Analisis Politik*. Bandung : Pustaka Reka Cipta.

UNDANG-UNDANG

UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

UU Nomor 8 tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

UU Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik.

AD ART PDI Perjuangan

WEB SITE

<https://m.tempo.co/read/news/2015/07/27/058686816/pilkada-serentak-pdip-jateng-target-menang-di-15-daerah>

<http://www.infowonogiri.com/baca/wonogiri-hari-ini/2015/07/sejarah-unik-bupati-petahana-gagal-raih-rekomendasi/>

JURNAL

AAGN Ari Dwipayana. 2009. *Demokrasi Biaya Tinggi Dimensi Ekonomi*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM.

Alfiah Noor Ramadhany. 2016. *Pengaruh Strategi Pemasaran Politik Calon Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Terhadap Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Serentak 2015*. Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Mulawarman.

Cornelis Lay. 2007. *Pemilukada Langsung dan Pendalaman Demokrasi*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Nazaruddin Latif. 2011. *Dinamika Politik Muhammadiyah*.

Nur Rohim. 2014. *Gagasan Pemilu Serentak dan Implikasinya Terhadap Pesta Demokrasi Yang Efektif dan Efisien*. UIN Jakarta.